



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan ditujukan untuk mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing serta mencapai tujuan pembangunan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan sasaran kependudukan diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan perlu menyusun peraturan bupati tentang peta jalan pembangunan kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan atau Desain Besar Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat DBPK adalah sebuah kerangka kebijakan jangka panjang untuk mengarahkan pembangunan kependudukan agar selaras dengan target pembangunan nasional dan Daerah.
2. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah dokumen operasionalisasi DBPK selama 5 (lima) tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
5. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

10. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar
18. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dokumen operasionalisasi Pembangunan Kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:

- a. mewujudkan pengendalian Kuantitas Penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan Kualitas Penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan Keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan pangkalan data Kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

Pasal 4

- (1) PJPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Sasaran Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029
 - c. BAB III : Rencana Aksi Tahun 2025-2029
 - d. BAB IV : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan Pembangunan Kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 April 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

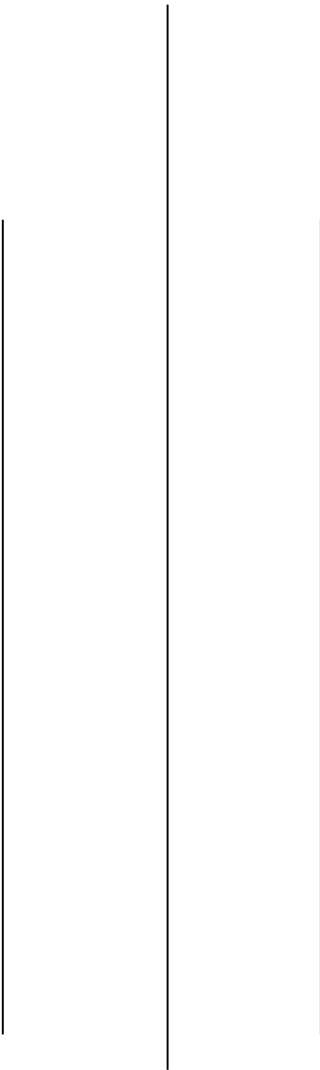
Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Kabupaten Kulon Progo

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Kulon Progo*. Dokumen ini merupakan landasan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

Perubahan struktur dan dinamika kependudukan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah, menuntut adanya kebijakan yang responsif, adaptif, dan berbasis data. Oleh karena itu, keberadaan peta jalan ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan langkah-langkah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas, mobilitas, dan tata kelola kependudukan yang lebih baik.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, akademisi, lembaga masyarakat, hingga mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi ini merupakan wujud nyata bahwa pembangunan kependudukan adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan sinergi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak luas.

Kami berharap *Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo* ini dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh unsur pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan, serta bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi aktif mendukung pembangunan kependudukan. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas bagi terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya bersama ini menjadi langkah nyata bagi masa depan Kulon Progo yang lebih baik.

Kulon Progo, 1 Desember 2025

a.n. Bupati Kulon Progo

Sekretaris Daerah



TRIYONO, SIP., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

BAB I4

PENDAHULUAN4

 A. Latar Belakang4

 B. Tujuan.....4

 C. Sasaran.....4

 D. Dasar Hukum5

 E. Batasan Pengertian.....6

 F. Analisis Situasi Kependudukan8

 G. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan.....28

BAB II29

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-202929

 A. Arah Kebijakan.....29

 B. Strategi.....29

 C. Target.....30

BAB III33

RENCANA AKSI TAHUN 2025-202933

 A. Tata Kelola PJPK.....33

 B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029 Setiap Sasaran.....37

 SASARAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK39

 SASARAN 3 : PEMBANGUNAN KELUARGA.....45

 SASARAN 4 : PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS
PENDUDUK47

 SASARAN 5 : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN48

BAB IV.....49

PENUTUP49

 A. Monitoring.....49

 B. Evaluasi49

 C. Pelaporan.....49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyongsong bonus demografi, menghadapi *aging population* dan menyelesaikan isu kependudukan lainnya serta dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

GDPK merupakan sebuah dokumen rancang induk sehingga diperlukan instrumen untuk dapat dijabarkan ke lebih teknis dan detail. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 — 2045 bahwa arahan kebijakan yang termuat dalam RPJPN perlu ditindaklanjuti dalam dokumen yang lebih spesifik, salah satunya melalui peta jalan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini disusun setiap 5 tahun sekali sebagai *living document* dengan di dalamnya termasuk rencana aksi.

Sebagai panduan strategis dan rencana aksi selama lima tahunan untuk mengimplementasikan kebijakan GDPK di tingkat daerah agar selaras dengan visi pembangunan nasional perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Sebagai turunan dari GDPK, PJPK juga mencakup 5 pilar utama yaitu Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta Penataan Administrasi Kependudukan. PJPK menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan kependudukan yang harus tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang selalu termutakhirkan.

B. Tujuan

Memberikan gambaran operasionalisasi Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 dan secara khusus bertujuan untuk mengarahkan dan mewujudkan 5 sasaran kependudukan.

C. Sasaran

Sasaran Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2025 – 2029 ini adalah:

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk
2. Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Pembangunan Keluarga
4. Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
5. Penataan Administrasi Kependudukan

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengendalian Penduduk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035;

E. Batasan Pengertian

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
4. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
14. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) atau Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) adalah sebuah kerangka kebijakan jangka panjang (umumnya 25 tahun) untuk mengarahkan pembangunan kependudukan di Indonesia agar selaras dengan target pembangunan nasional.

17. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
18. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
19. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

F. Analisis Situasi Kependudukan

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Total Fertility Rate (TFR)	1. Perubahan paradigma dan nilai berkeluarga tentang anak 2. Keengganan untuk memiliki anak dan menikah 3. Pemakaian Kontrasepsi meningkat 4. Kecenderungan Median Usia Kawin Pertama (mUKP) meningkat	1,98 : terus menurun sampai di bawah tingkat <i>replacement</i>	1. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mengenai jumlah anak dan pernikahan untuk membangun keluarga 2. Meningkatkan kualitas layanan keluarga berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) berisiko 3. Menciptakan dunia kerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui insentif bagi pasangan dari pemerintah	1. Kesehatan dan Kesejahteraan keluarga baik 2. Kualitas Layanan Keluarga Berencana (KB) tercapai dengan baik 3. Meningkatnya ekonomi keluarga dengan Pendapatan/ Penghasilan Keluarga yang cukup melalui dunia kerja
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	1. Kurangnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi 2. Pengaruh budaya pernikahan usia muda	7,30 : Angka kelahiran remaja masih cukup tinggi di Kabupaten Kulon Progo	1. Penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah 2. Program Generasi Berencana (GenRe)	1. Menurunnya pernikahan dini 2. Menurunnya risiko kesehatan ibu dan bayi

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		3. Minimnya peran orang tua dan kontrol sosial		3. Peningkatan akses informasi dan layanan ramah remaja	
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	1. Ketersediaan alkon dan tenaga pemberi layanan KB terlatih belum optimal untuk wilayah tertentu 2. Ketidaksesuaian metode KB dengan preferensi/ efek samping 3. Ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan (kurangnya partisipasi laki-laki dalam kepesertaan KB) 4. Belum optimalnya KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi	83, 69: KB semakin terpenuhi, <i>unmet need</i> semakin turun	1. Penyediaan Alat Kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kapasitas pemberi layanan KB 2. Peningkatan peran serta laki-laki dalam kepesertaan KB 3. Penggerakan pelayanan KB secara menyeluruh dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran penyuluh KB dan kader di tingkat kalurahan	1. Terpenuhinya kebutuhan ber-KB 2. Meningkatnya kualitas hidup keluarga 3. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	1. Meskipun ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun terdapat pengeluaran lain seperti biaya non-akademik, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya yang menjadi beban finansial bagi keluarga kurang mampu	1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang tertinggi di Provinsi DIY, yakni sebesar 15.62% atau sekitar 71.480 jiwa.	1. Peningkatan layanan pendidikan: a. Mengalokasikan biaya personil untuk semua sekolah negeri dan swasta termasuk MI dan MTS serta pemberian beasiswa miskin bagi siswa (jenjang SD dan SMP), melalui subkegiatan Penyediaan Biaya Personil di semua jenjang. b. Pengelolaan dana BOSP jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan.	Peningkatan angka partisipasi sekolah. Semakin tinggi partisipasi sekolah maka semakin besar kemungkinan untuk menyelesaikan pendidikan dan bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini secara langsung akan meningkatkan jumlah tahun rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk.

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		2. Masih ada anak usia sekolah terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. 3. Pendidikan orang tua yang rendah sering kali berkorelasi dengan RLS anak yang rendah. Orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung lebih menyadari pentingnya sekolah dan memberikan	2. Berdasarkan data dari Kemendikdasmen (ats.data.kemendikdasmen.go.id) sebanyak 999 anak sekolah di Kulon Progo yang DO dan atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. 3. Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo usia 25 tahun ke atas sebesar 9.2 tahun atau setara jenjang SMP.	c. Bekerjasama dengan Baznas untuk bantuan kepada siswa miskin melalui program SIABAZKU (1600 siswa SD dan 500 siswa SMP) 2. Pengentasan Anak Tidak Sekolah: a. Pendataan/verifikasi data anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan melibatkan kewilayahan (Kalurahan, kelurahan) melalui subkegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan. b. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C di PKBM dan SKB. Untuk memperluas jangkauan layanan dibuka kelas jauh untuk kejar paket C. 3. Advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta melibatkan mereka dalam pengembangan sekolah. (Subkegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan)	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		dukungan lebih besar kepada anak-anaknya. 4. Kondisi geografis cukup menyulitkan akses ke sekolah 5. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga dapat mengurangi minat siswa untuk terus bersekolah 6. Kompetensi guru dan metode pembelajaran yang kurang menarik dapat membuat siswa tidak termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikannya	4. Topografi Kabupaten Kulon Progo bervariasi, perbukitan dataran tinggi di sebelah utara, dengan ketinggian antara 500 -1000 meter di atas permukaan laut, mencakup kecamatan - kecamatan seperti Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang , dan Samigaluh. 5. Masih ditemukan sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak berat, tidak memiliki perpustakaan, laboratorium maupun sarana prasarana pendukung lainnya. 6. Guru bersertifikasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 56.43%. Studi menunjukkan bahwa sertifikasi berkorelasi positif	4. Penyediaan akses pendidikan: a. Penyediaan sekolah dan distribusi guru di kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh. b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran di daerah terpencil (penggunaan akun belajar.id) 5. Pembangunan/ rehabilitasi/ revitalisasi sekolah, bersumber dana dari daerah, pusat maupun lembaga non pemerintahan lainnya. 6. Pengembangan Karir dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui uji kompetensi, bimtek/pelatihan, pengusulan sertifikasi serta perluasan informasi terkait	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
			dengan kinerja guru. Artinya, semakin baik sertifikasi dan kinerja guru, semakin baik pula kegiatan belajar mengajar, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan	pendidikan profesi guru	
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (Proxy : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%))	Banyak keluarga miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi.	49,66: Masih ada sekitar setengah penduduk usia kuliah yang belum/tidak kuliah	Peningkatan akses, layanan dan mutu pendidikan dasar (dikdas) agar siswa memiliki kemampuan literasi, numerasi, dasar-dasar pengetahuan, berpikir kritis dan memiliki karakter kuat dan semangat untuk terus belajar.	Semakin tinggi partisipasi pendidikan dasar maka semakin besar kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (Proxy : Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensi Kerja)	Dikarenakan adanya penurunan anggaran	48,23 : terus bertambah tenaga kerja memiliki sertifikat berkompetensi	1. Proses Pelaksanaan Diklat Ketrampilan Bagi Pencaker Berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarpras LPK 3. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta	Peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi dan kompeten
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Akses Gizi Buruk: Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, terutama protein hewani, serta	Prevalensi stunting di tahun 2025. Smt 3 sebanyak : 10,64	1. Intervensi Gizi (Spesifik): a. Edukasi Gizi: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai	1. Menurunnya status stunting 2. Meningkatnya status gizi balita

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		kurangnya pengetahuan gizi seimbang pada masyarakat. 2. Pola Asuh yang Kurang Tepat: Pengetahuan yang kurang tentang pola makan dan perawatan yang tepat bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. 3. Pelayanan Kesehatan dan Sanitasi: Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih, serta rendahnya kualitas sanitasi dan akses air bersih. 4. Koordinasi Lintas Sektor: Lemahnya koordinasi dan sinergi antar berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, pangan, dll.) serta antarwilayah, yang menyebabkan ketumpangtindihan dan inefisiensi program. 5. Perilaku dan Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program penurunan stunting. 6. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi		gizi seimbang dan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. b. Pemberian Makanan Tambahan: Memberikan makanan tambahan yang kaya protein hewani kepada ibu hamil dan anak-anak usia dini. c. ASI Eksklusif: Mendorong pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan dan imunisasi lengkap. 2. Intervensi Sanitasi dan Kesehatan (Sensitif): a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik di lingkungan keluarga. b. Pemantauan Kesehatan: Meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak di Posyandu dan pelayanan kesehatan lainnya. 3. Penguatan Sistem dan Regulasi: a. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		keluarga yang sulit dapat memengaruhi akses terhadap makanan bergizi.		t koordinasi lintas sektor dan antarwilayah melalui forum-forum komunikasi dan sinergi kebijakan. b. Peningkatan Kualitas SDM: Melatih tenaga kesehatan dan kader pembanguna n agar memiliki kapasitas yang memadai. 4. Pemberdayaan Masyarakat: a. Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku positif. b. Melibatkan Swasta: Melibatkan swasta dalam memfasilitasi bantuan dan inovasi untuk menurunkan stunting. 5. Pendekatan Holistik: Menggunakan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek kesehatan, gizi, pendidikan, dan lingkungan. 6. Kolaborasi Lintas Sektor: Membangun kerja sama	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
				yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. 7. Fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan: 8. Memberikan perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun	
8	Angka Kematian Bayi (AKB) (Proxy :Jumlah Kasus Kematian Bayi)	1. Akses Terbatas: Keterbatasan akses ibu dan bayi terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai. 2. Status Gizi Buruk: Gizi ibu yang buruk dapat menyebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR), yang menjadi kesehatan dominan penyebab AKB. 3. Faktor Sosio-ekonomi: Aspek sosio-ekonomi dan lingkungan juga berperan dalam tingginya AKB. 4. Kendala Implementasi Program: Terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan dan program yang telah dibuat.	Tahun 2025 semester III, jumlah kematian bayi sebanyak 30 orang.	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Fokus pada pelayanan asuhan berkelanjutan (Continuity of Care). 2. Deteksi Dini: Melakukan deteksi dini pada kasus yang berpotensi mengancam ibu dan janin. 3. Pemberdayaan Masyarakat : Melibatkan masyarakat dan keluarga melalui promosi kesehatan dan konseling. 4. Pendekatan Terintegrasi: Mengembangkan strategi kebijakan yang mengintegrasikan berbagai intervensi untuk mencapai hasil yang optimal. 5. Penguatan Kebijakan: Menyusun dan menganalisis strategi kebijakan untuk menurunkan AKB di tingkat daerah. 6. Kemitraan:	Menurunnya jumlah kematian bayi

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
				Membangun kemitraan dengan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. 7. Promosi Kesehatan: Melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 8. Koordinasi Antar Lini: Membangun layanan kesehatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dari tingkat desa/kelurahan hingga fasilitas kesehatan rujukan.	
9	Angka Kematian Ibu (AKI) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Ibu)	1. Akses Pelayanan Kesehatan : Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. 2. Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum optimal. 3. Faktor Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi ibu yang rendah. 4. Perilaku Ibu dan Masyarakat : Kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman	Tahun 2025 semester III, jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang.	1. Penguatan Sistem Rujukan : Memperbaiki sistem rujukan ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. 2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan: Pelatihan berkelanjutan bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya. 3. Edukasi dan Konseling : Memberikan informasi yang akurat kepada ibu dan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. 4. Pemberdayaan Perempuan : Melibatkan perempuan dalam	1. Menurunnya jumlah kematian ibu 2. Meningkatnya status Kesehatan ibu

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
				pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. 5. Program Edukasi Komprehensi: Meningkatkan kesadaran ibu, keluarga, dan masyarakat tentang pentingnya kehamilan yang sehat. 6. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Memadai: Memastikan ketersediaan peralatan dan tenaga medis yang dibutuhkan di setiap fasilitas kesehatan. 7. Kolaborasi Lintas Sektor: Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program penurunan AKI.	
10	Tingkat Kemiskinan	Angka kemiskinan kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DIY : Tahun 2020 : 18,01 % Tahun 2021 : 18,38 % Tahun 2022 : 16,39 % Tahun 2023 : 15,64 % Tahun 2024 : 15,62 % ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon	Tingkat kemiskinan kabupaten kulon progo masih tergolong tinggi dari kabupaten/Kota yang berada di Provinsi DIY angka ini sebagai perbandingan pada tahun 2024 dari data BPS menunjukan Kabupaten Kulon Progo berada di angka 15,62% sedangkan Gunung Kidul	Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kulon progo untuk mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha membina dan mengembangkan ekonomi Tangguh dan mandiri, Peningkatan Sumber Daya	Dari kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagai salah satu Upaya penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		Progo masih menjadi salah satu kantong kemiskinan (poverty pocket) di wilayah	15,18% Kabupaten Bantul 11,66% Kabupaten Sleman 7,46% dan Kota Yogyakarta 6,26% sementara itu Provinsi DIY 7,46% angka diatas menunjukan Kulon Progo masih di atas Provinsi DIY, Maka dari itu diperlukannya Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menurunkan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo	Manusia melalui pelatihan pelatihan, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan, serta Peningkatan Infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu juga dengan Kerjasama lintas sektor dengan lembaga non pemerintahan dan swasta (<i>Corporate Social Responsibility/ CSR</i>) dalam pengentasan kemiskinan	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kesadaran dan pemahaman untuk tanggung jawab mencari nafkah bukan pada wanita	72,66 : Terus meningkat tenaga kerja wanita dalam membantu peran serta di keluarga	1. Pelatihan <i>Makeup Artist / MUA</i> 96 2. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 3. Pelatihan Rias Pengantin dan Hantaran	Meningkatnya kesejahteraan keluarga
12	Persentase Pekerja Informal	Menjamin adanya jaminan sosial dan meningkatkan keahlian/skil dan inovasi produk	66,82 : Terus bertambah tenaga kerja informal yang memiliki jaminan sosial	1. Pelatihan Barista 180 JP 2. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 140 3. Pelatihan Souvenir 4. Pelatihan Barbershop 5. Pelatihan Cabinet Making 6. Pelatihan Room Attendant 7. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 96 8. Pelatihan MUA 96 9. Pelatihan Operator Garmen 10. Pelatihan Rias Pengantin dan Hantaran 11. Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin 260	Memberikan jaminan sosial dan meningkatkan keahlian serta inovasi produk

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
				12. Pelatihan Practical Office Advance 260 13. Pelatihan Perawatan AC Split 240 14. Pelatihan Junior Administrative Assistant 260 15. Pelatihan Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi 300 16. Pelatihan Barista 18 Pelatihan Desain Grafis Muda 260 17. Pelatihan Perakitan Komputer 260 JP 18. Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi 260 19. Pelatihan Plat Welder SMAW 1G/PA 220	
13	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Kesadaran perusahaan dan pemerintah untuk memenuhi target minimal untuk mengakomodir penyandang disabilitas sebagai pekerja formal	0,89 : persentase semakin naik setiap tahun dan tahun sebelumnya 0,76	Pelatihan Budidaya Kambing/ Domba	
14	Gini Ratio	Dalam menganalisis kesejahteraan ekonomi di daerah indeks Gini menjadi penting dikarenakan dapat mengukur pemerataan distribusi pendapatan penduduk serta ketimpangannya angka gini ratio di Kabupaten Kulon Progo rentang waktu 2020 sampai dengan 2024 yang hampir sempurna, sebaliknya semakin mendekat 0	Gini rasio Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif namun berada di bawah rata rata DIY dan Nasional pada tahun 2024, gini ratio di Kulon Progo menunjukkan angka 0,37 angka ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu di angka 0,40, Provinsi Daerah	Untuk menurunkan ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo adalah percepatan pemerataan ekonomi melalui program inklusi keuangan dan kredit mikro, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan produktivitas, serta insentif usaha mikro, kecil menengah. meningkatkan investasi di kulon Progo, pemberdayaan masyarakat dan	Dari kebijakan strategis yang akan diambil maka diharapkan secara simultan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih merata yang dapat dilihat dengan target turunnya angka ketimpangan/ Gini ratio

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		distribusi pendapatan semakin merata, mendekati kondisi pemerataan yang sempurna Rasio gini memiliki anak rentang 0 sampai dengan 1 semakin besar ketimpangan pendapatan penduduk yang mengidentifikasikan kondisi ketimpangan 2020 : 0,37 2021 : 0,36 2022 : 0,38 2023: 0,40 2024 :0,37 Dari angka diatas menggambarkan bahwa Gini Ratio di kabupaten kulon progo menunjukan angka yang fluktuatif hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya dapat disebabkan oleh kesenjangan yang signifikan antara kelompok berpendapatan menengah kebawah dengan masyarakat dengan pendapatan tinggi, beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah konsentrasi asset dan peluang ekonomi di segelintir kelompok, rendahnya akses pendidikan dan layanan keuangan inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dominasi sektor informal dengan upah rendah	Istimewa Yogyakarta ada di angka 0,42 sementara angka Gini Ratio Nasional menunjukan angka 0,38 angka ini cenderung stabil	penumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Peningkatan pelayanan infrastruktur daerah yang lebih merata,	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun Tahun 2020 : 26,97 Juta Tahun 2021 : 28,85 Juta Tahun 2022 : 32,48 Juta Tahun 2023 : 35,77 Juta Tahun 2024 : 37,98 Juta Untuk menggambarkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi rata rata penduduk di suatu daerah, PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai proksi yang sesuai karena dapat mengukur rata rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di wilayah dalam periode tertentu. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun pendapatan masyarakat secara nominal. Namun peningkatan ini belum mencerminkan kesejahteraan secara merata, penyebabnya adalah rendahnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di daerah dibandingkan dengan jumlah	PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang meningkat Tahun 2020 : 26,97 Juta Tahun 2021 : 28,85 Juta Tahun 2022 : 32,48 Juta Tahun 2023 : 35,77 Juta Tahun 2024 : 37,98 Juta Kondisi ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.	Kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan digitalisasi UMKM, serta perluasan akses terhadap modal dan pasar saat ini Kabupaten Kulon Progo telah melakukan digitalisasi UMKM melalui aplikasi https://pay-onpro.kulonprogokab.go.id/	Dari kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan PDRB perkapita kabupaten sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		penduduk, yang tercermin dalam PDRB per kapita. Hal ini terjadi disebabkan oleh dominasi sektor sektor berproduktivitas rendah, lemahnya investasi produktif, terbatasnya inovasi dan adopsi teknologi, serta ketergantungan pada sektor informal atau primer tanpa hilirisasi.			
16	Tingkat Penggangguran Terbuka	Meningkatkan informasi lowongan pekerjaan (offline dan online)	2,01 : Terus menurun untuk mengentaskan angka pengangguran	1. Bimbingan Teknis Antar Kerja Bagi Pengelola BKK 2. Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi/ Rekreman Calon Tenaga Kerja 3. Sosialisasi Antar Kerja Ke Sekolah (SMA/SMK/MA) 4. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja kepada Masyarakat di Kalurahan 5. Pelaksanaan OPP bagi Calon Tenaga Kerja 6. Sosialisasi Antara Perusahaan BKK Pencari Kerja 7. Upah penyedia Data bagi 32 Pengelola BKK 8. Workshop ULD 9. Pelaksaan Job Fair 10. Kegiatan Pelayanan AK 1	Menurunnya angka pengangguran terbuka
17	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi)	Sebagian besar Penduduk bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah PTKP sehingga belum perlu memiliki	Jumlah NPWP Orang Pribadi dengan status aktif tahun 2024 sebanyak 39.594, dengan jumlah penduduk ± 450.000 jiwa	Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) untuk penambahan WP baru potensial dan optimalisasi kanal digital untuk mempermudah	Dampak dan arah perbaikan yang diharapkan: Meningkatnya kesadaran pajak masyarakat dan kepatuhan formal serta material. Perluasan basis

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		NPWP	dan angkatan kerja ± 230.000 orang, maka rasio kepemilikan NPWP terhadap penduduk produktif masih sekitar 16%. Struktur ekonomi Kulon Progo masih didominasi sektor pertanian (24%), perdagangan (20%), dan jasa (17%).	pendaftaran NPWP dan memperluas jangkauan layanan	pajak yang berkelanjutan untuk mendukung penerimaan nasional. Terbangunnya Kolaborasi strategis antara DJP dan Pemerintah Daerah, dalam ekosistem data kependudukan dan ekonomi Kulon Progo. Penguatan kemandirian fiskal melalui pertumbuhan wajib pajak aktif.
18	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	1. Ketimpangan sosial dan ekonomi 2. Ketidakseimbangan fungsi keluarga khususnya (perlindungan, reproduksi, ekonomi) 3. Belum optimalnya akses pada layanan dasar keluarga	64,30: Nilai iBangga belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan fungsi keluarga	1. Optimalisasi implementasi 8 Fungsi Keluarga 2. Revitalisasi Kelompok-kelompok Kegiatan (Poktan) di Kampung Keluarga Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga 2. Menuurunnya masalah sosial dalam rumah tangga
19	Indeks Perlindungan Anak	Hak anak belum sepenuhnya terpenuhi	Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun meningkat, rekomendasi perkawinan usia dini juga meningkat	Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak	Hak anak terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat meningkat
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Menurunnya Tingkat Swadaya Masyarakat, sehingga kemampuan untuk pembiayaan bedah rumah mengalami kendala	Data capaian Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 11,27 %, mengalami kenaikan sebesar 0,7 % dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 10,57 %	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
21	Rumah Tangga	Kurangnya kesadaran dean	Data capaian Persentase	1. Penyediaan/Pembangunan Tangki	Meningkatnya jumlah Rumah

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
	dengan akses sanitasi aman (%)	pengetahuan Masyarakat tentang sanitasi aman menyebabkan menurunnya kesediaan mereka dalam menerima bantuan sanitasi	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 2024 sebesar 89%, mengalami kenaikan sebesar 9% dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 88%	Septik Skala Individual 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan IPLT	Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
22	Indeks Lansia Berdaya	1. Lansia makin banyak, usia harapan hidup meningkat 2. Minimnya program pemberdayaan lansia	55,88: Sebagian besar lansia belum terlibat aktif dalam kehidupan sosial/ekonomi	1. Optimalisasi Program BKL (Bina Keluarga Lansia) 2. Optimalisasi Layanan posyandu lansia 3. Pelatihan keterampilan atau kegiatan produktif lansia	1. Mengurangi beban ketergantungan ekonomi pada keluarga 2. Meningkatkan kualitas hidup lansia 3. Menurunnya risiko kesehatan mental lansia
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	1. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan remaja 2. Perubahan pola asuh remaja dan kesenjangan generasi 3. Ketimpangan komunikasi antara anak dan orang tua 4. Pengaruh negatif media sosial, globalisasi, dan lingkungan	90, 46: Praktik pengasuhan sudah optimal	1. Optimalisasi Program BKR (Bina Keluarga Remaja), Genre, dan PIK R 2. Kelas pengasuhan remaja untuk orang tua. 3. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membina remaja	1. Menurunnya kenakalan remaja 2. Meningkatnya ketahanan remaja terhadap pengaruh negatif 3. Menurunnya Potensi gangguan perkembangan psikologis remaja
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1. Sumber daya terbatas: Kekurangan dana, tenaga kesehatan, dan infrastruktur yang tidak memadai. 2. Kesenjangan layanan: Akses layanan kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil. 3. Isu administrasi: Masalah pada sistem data kependudukan	Cakupan kepesertaan JKN pada tahun 2025 smt 3 sebanyak 99,26%	1. Reformasi kebijakan: Memperbaiki kebijakan dan regulasi untuk mendukung UHC secara menyeluruh. 2. Alokasi anggaran: Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk program kesehatan. 3. Peningkatan kapasitas: Memperbaiki kualitas dan distribusi	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menuju Universal Health Coverage (UHC)

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
		dan administrasi yang rumit bagi peserta. 4. Pemahaman masyarakat: Kurangnya pemahaman tentang prosedur dan hak dalam program UHC (Universal Health Coverage), yang seringkali membuat masyarakat kecewa. 5. Koordinasi: Kurangnya keseragaman pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemangku kepentingan lain.		tenaga kesehatan serta infrastruktur pelayanan. 4. Perbaiki sistem: Mengembangkan sistem informasi dan administrasi yang lebih efisien dan terintegrasi. 5. Sosialisasi dan edukasi: Melakukan sosialisasi yang masif dan jelas kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang UHC. 6. Komitmen pemerintah: Membangun komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mendukung UHC, seperti yang ditunjukkan oleh program UHC Prioritas. 7. Fokus promotif dan preventif: Menedepankan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk menekan biaya kuratif di masa depan. 8. Koordinasi antarlembaga: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga terkait, termasuk legislatif, untuk menyelaraskan kebijakan dan menghindari mispersepsi. 9. Pemberdayaan masyarakat: Melibatkan masyarakat	

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
				dalam upaya pencapaian UHC melalui partisipasi aktif dan kesadaran akan hak serta kewajiban. 10. Pembelajaran dari negara lain: Mempelajari pengalaman negara lain yang telah berhasil mencapai UHC, khususnya dalam menghadapi transisi epidemiologi	
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	1. Ketergantungan / keterbatasan anggaran 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB 3. Keterbatasan kapasitas kader	64,77 : Persentase Kampung KB Klasifikasi Mandiri dan Berkelanjutan semakin tinggi	- Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM Kampung KB - Pendampingan intensif dan insentif bagi Kampung KB	- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberlangsungan Program Bangga Kencana
26	Rate Nett Recent Migrasi (Proxy : Kepadatan Penduduk)	1. Kesenjangan kesempatan kerja antara perdesaan dan perkantoran masih tinggi. 2. Terbatasnya peluang ekonomi lokal mendorong migrasi keluar daerah, terutama usia produktif.	Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 759,01 jiwa per kilometer persegi, tergolong dalam kategori sedang. Pola persebaran penduduk tidak merata, dimana kepadatan tertinggi terdapat di Kapanewon Wates (1.543,51 jiwa/km ²), Lendah (1.163,30 jiwa/km ²), Galur (997,62 jiwa/km ²) yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Sementara keadaan terendah terdapat di Kecamatan	1. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengurangi dorongan migrasi keluar misal dengan pengembangan UMKM dan ekonomi desa. 2. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyediaan lapangan kerja dan pelatihan kewirausahaan di daerah asal migran. 3. Sosialisasi peluang kerja lokal dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di wilayah sekitar.	1. Terkendalinya Tingkat migrasi keluar daerah 2. Meningkatnya daya tarik ekonomi lokal sehingga migrasi bersifat sirkuler atau kembali.

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
			Samigaluh (428,15 jiwa/km²), Girimulyo (450,02 C), Kokap (485,29 jiwa/km²) yang memiliki geografis berbukit dan keterbatasan sumber daya air. Kepadatan penduduk wilayah timur ke selatan relatif tinggi karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur, pusat ekonomi, dan layanan publik, sedangkan wilayah barat ke utara cenderung lebih jarang penduduk. *Rendah (<500 jiwa/km²) Sedang (500 – 1000 jiwa/km²) Tinggi (>1000 jiwa/km²)		
27	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	Anak-anak usia 0-4 tahun telah memiliki akta Kelahiran.	Semua anak usia 0-4 tahun telah memiliki akte kelahiran (persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta lahir tercapai 99,88 %).	Anak-anak usia 0-4 tahun tertib dokumen akta kelahiran.	Masa depan anak cerah karena hak sipilnya terpenuhi dan dengan kepemilikan akte kelahiran dapat digunakan untuk sekolah, mencari kerja, menikah dan lain-lain.
28	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaporkan peristiwa perceraian di Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicantumkan nomor register perceraian.	Kepemilikan Akta Cerai persentasenya 82,98 %	Perlu adanya pemutakhiran data untuk peristiwa perceraian mengisi nomor register dan tanggal perceraian di Kartu Keluarga.	Data semakin akurat dan mutakhir untuk kepemilikan akta cerai.
29	Cakupan (Persentase) Kepemilikan	Masih ada yang belum mencantumkan	Kepemilikan Akta Nikah	Perlu adanya pemutakhiran data untuk mengisi	Data semakin akurat dan mutakhir untuk

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
	n Akta Nikah	nomor register buku nikah maupun akta perkawinan di Kartu Keluarga.	persentasenya 90,12 %.	buku resgister dan tanggal perkawinan sehingga bisa tercapai persentasenya 100 % yang sudah menikah memiliki buku nikah.	kepemilikan akta nikah atau akta perkawinan.
30	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Setiap pelaporan peristiwa kematian telah diterbitkan akta Kematianannya.	Akta Kematian yang dilaporkan telah diterbitkan semuanya (jumlah kepemilikan Akta Kematian perentasenya 100%).	Data kematian update.	Data semakin akurat dan mutakhir untuk yang meninggal telah terhapus data base kependudukan sehingga untuk kepentingan demokrasi, jaminan kesehatan , jaminan sosial tidak lagi digunakan.

G. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

- Isu Strategis Pembangunan Kependudukan meliputi 5 sasaran yaitu :
- Sasaran 1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk
 - Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Penduduk
 - Sasaran 3 Pembangunan Keluarga
 - Sasaran 4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - Sasaran 5 Penataan Administrasi Kependudukan

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kependudukan tahun 2025-2029 adalah pertumbuhan penduduk seimbang dan penguatan karakter keluarga yang berfokus pada 5 sasaran utama yaitu Pengelolaan kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Pembangunan keluarga, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Administrasi data kependudukan.

B. Strategi

Strategis Pembangunan Kependudukan tahun 2025 – 2029 meliputi :

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Strategi pengelolaan kuantitas penduduk mencakup pengendalian kelahiran melalui program seperti optimalisasi program Keluarga Berencana (KB), penurunan angka kematian melalui peningkatan layanan kesehatan, dan pengarahannya mobilitas penduduk seperti transmigrasi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, peningkatan pendidikan kependudukan dan pemberdayaan perempuan juga menjadi strategi penting untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan mengurangi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Strategi peningkatan kualitas penduduk meliputi peningkatan pendidikan (melalui pemerataan akses, wajib belajar, dan peningkatan mutu), kesehatan (melalui peningkatan akses dan fasilitas pelayanan kesehatan), serta ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan redistribusi kekayaan

3. Pembangunan Keluarga

Strategi pembangunan keluarga mencakup penguatan institusi keluarga melalui penanaman nilai dan karakter, peningkatan kualitas hidup dengan pemenuhan hak sipil, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi ini juga melibatkan penguatan sistem informasi dan advokasi program, serta pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan Tangguh

4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Strategi penataan persebaran dan pengarahannya meliputi upaya untuk menciptakan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung lingkungan, mengelola urbanisasi, serta mengarahkan mobilitas penduduk ke wilayah yang lebih sesuai

5. Administrasi Kependudukan

Strategi penataan administrasi data kependudukan meliputi pengelolaan data terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan dan digitalisasi pelayanan, kolaborasi antar-instansi, dan sosialisasi kesadaran masyarakat

C. Target

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengelolaan	Total Fertility Rate (TFR)	1,98	BKKBN	1,99	2,00	1,99	1,99	1,99
2	Kuantitas Penduduk	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	7,30	BKKBN	6,80	6,30	5,80	5,40	5,00
3		Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	83,69	BKKBN	84,30	85,00	85,70	86,30	87,00
4	Peningkatan Kualitas Penduduk	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,20	Dinas Dikpora	9,36	9,46	9,55	9,65	9,74
5		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (Proxy : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%))	49,66	Badan Pusat Statistik	56,48	57,00	58,00	59,00	60,00
6		Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (Proxy : Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensi Kerja)	48,23	Dinas Tenaga Kerja	49,57	50,23	51,57	52,23	53,57
7		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,00	Dinas Kesehatan	17,00	16,29	15,43	14,71	13,86
8		Angka Kematian Bayi (AKB) (Proxy :Jumlah Kasus Kematian Bayi)	10,24	Dians Kesehatan	10,39	10,32	10,26	10,18	10,07
9		Angka Kematian Ibu (AKI) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Ibu)	58,53	Dinas Kesehatan	61,12	62,56	64,14	65,66	67,14

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
10		Tingkat Kemiskinan	15,62	Dinas Sosial PPPA, BAPPER IDA	14,12-15,12	13,69-14,69	13,26-14,26	12,83-13,83	12,40-13,40
11		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	72,66	Dinas Tenaga Kerja	68,59-72,84	68,62-72,86	68,66-72,90	68,69-72,94	68,73-72,97
12		Persentase Pekerja Informal	66,82	Dinas Tenaga Kerja	66,21-67,99	64,53-68,47	64,80-68,98	65,40-70,25	65,40-70,25
13		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,89	Dinas Tenaga Kerja	0,80-0,89	0,80-0,89	0,80-0,89	0,80-0,89	0,80-0,89
14		Gini Ratio	0,37	BAPPER IDA	0,372 - 0,402	0,371 - 0,401	0,370 - 0,400	0,369 - 0,399	0,367 - 0,397
15		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	37976,26	BAPPER IDA	42.865 - 43.357	42.865 - 43.357	45.874 - 46.666	49.087 - 50.221	52.516 - 54.036
16		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,01	Dinas Tenaga Kerja	1,95 - 2,55	1,90 - 2,50	1,90 - 2,45	1,90 - 2,40	1,90 - 2,35
17	Pembangunan Keluarga	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi) (Jumlah Wajib Pajak Daerah)	366.124	BKAD	370.858	374.078	377.958	381.866	385.837
18		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,30	BKKBN	65,20	66,10	67,10	68,00	69,00
19		Indeks Perlindungan Anak	n/a	Dinsos PPPA	69,30	69,30	70,00	70,00	70,00
20		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,44	Dinas PU PKP	50,45	52,93	55,41	57,89	60,36
21		Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,2	Dinas PU PKP	11,85	13,51	15,16	16,82	18,47
22		Indeks Lansia Berdaya	55,88	BKKBN	56,70	57,50	58,20	59,00	59,70

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
23		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	90,46	BKKBN	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00
24		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	99,11	Dinas Kesehatan	99,25 - 99,95	99,26 - 99,95	99,26 - 99,95	99,26 - 99,95	99,26 - 99,95
25	Penataan Persebaran dan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	64,77	BKKBN	67,75	68,70	70,70	72,80	75,00
26	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	Rate Nett Recent Migrasi (Proxy : Kepadatan Penduduk)	759,01	BPS	744,31	777,84	781,23	784,41	787,44
27	Administrasi Kependudukan	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	99,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93
28		Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	82,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,51	86,04	87,57	89,10	97,62
29		Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	90,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,62	93,12	94,62	96,12	97,62
30		Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100

BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029

A. Tata Kelola PJPK

Tata Kelola Pembangunan kependudukan merupakan serangkaian mekanisme, proses, dan kelembagaan yang bertujuan untuk mengoordinasikan, mensinergikan, efektif, efisien dan berkelanjutan. Tata Kelola ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan kependudukan yang terencana dan terpadu melalui kolaborasi berbagai sektor terkait.

Kelembagaan tata Kelola Pembangunan kependudukan di tingkat daerah dilaksanakan oleh TIM Koordinasi GDPK/PJPK Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan secara efektif, terintegrasi dan terpadu. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dalam penyusunan dan pelaksanaan PJPK perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK/PJPK Kabupaten Kulon Progo dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

- 1 Pembina : Bupati Kabupaten Kulon Progo
- 2 Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 3 Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 4 Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 5 Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
 - c. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
 - d. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo

- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
 - g. Kepala Badan Pusat Statistik
 - h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
- 6 Kelompok Kerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PMKal Dalduk KB Kabupaten Kulon Progo
- Anggota : a. Ketua Tim Pengendalian Penduduk dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Ketua Tim Jaminan dan Kesertaan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 7 Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk
- Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo
- Anggota : a. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo
- b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
- 8 Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga
- Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
- Anggota : a. Ketua Tim Advokasi dan Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Ketua Tim Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9 Kelompok Kerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 - Anggota : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- 10 Kelompok Kerja Penataan Administrasi Kependudukan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 - Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Penduduk

Rincian Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK/PJPK Kabupaten Kulon Progo

1. Ketua mempunyai tugas memberikan pengarahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat serta menetapkan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan GDPK sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta agenda Perencanaan Daerah.
2. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam memberikan pengaraham, pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam koordinasi pelaksanaan GDPK.
3. Sekretaris mempunyai tugas memfasilitasi dalam hal administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam koordinasi pelaksanaan GDPK

4. Kelompok Kerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk mempunyai tugas mengelola jumlah penduduk agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengaturan mobilitas.
5. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk mempunyai tugas meningkatkan kualitas penduduk melalui fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian dan peningkatan sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter.
6. Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga mempunyai tugas membangun keluarga yang berkualitas sejahtera lahir dan batin sebagai unit dasar dalam pembangunan sosial.
7. Kelompok Kerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas merencanakan penyebaran penduduk yang lebih merata di berbagai wilayah dan mengelola mobilitas penduduk.
8. Kelompok Kerja Penataan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib administrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan.

B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029 Setiap Sasaran

SASARAN 1 : PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Total Fertility Rate (TFR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 6. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 7. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 8. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 9. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	1. Pengendalian Penduduk 2. Pemberdayaan dan Peningkatan	1. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan pelaporan Program Bangsa Kencana 2. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		Keluarga Sejahtera (KS)	3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 5. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 6. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 7. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 8. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 9. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 10. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 11. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 12. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Pengendalian Penduduk dan KB

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 4. Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 6. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 7. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 8. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 9. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB
SASARAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK					
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan tenaga kependidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/ Pendidikan Non formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
		3. Pengembangan Kurikulum	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3. Program Pengembangan Kurikulum: Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (proxy : Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%))		1. Program Pengelolaan Pendidikan: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/ Pendidikan Non formal 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3. Program Pengembangan Kurikulum: Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Bukan Kewenangn Pemerintah Kabupaten</i>	<i>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</i>
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (proxy : Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan Digital Marketing 2. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 3. Pelatihan MUA 4. Pelatihan Tata Boga 5. Pelatihan Front Office 6. Pelatihan Menjahit Pakaian dengan mesin 7. Pelatihan Barbershop	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi)				
7	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Perbaikan gizi masyarakat)	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3. Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi, Cegah Stunting, Bumil Sehat, Posyandu Aktif, Pengendalian Penyakit Prioritas 4. Pertemuan Penguatan gizi seimbang dalam rangka percepatan penurunan stunting	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	(Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi	1. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas Kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam Upaya meningkatkan pemantauan Kesehatan bagi ibu dan bayi 2. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “Bumilku” dan “Kohort Elektronik” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauan 3. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit 4. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau Kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas 5. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
			6. Meningkatkan kualitas audit medik pelayanan KB dalam Kesehatan reproduksi 7. Mengoptimalkan pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan Kesehatan 8. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil beresiko tinggi.		
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil)	1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Antenatal Care (ANC), sebuah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter, dalam memberikan pelayanan kehamilan yang berkualitas 2. Rakor program pelayanan ibu hamil 3. Monitoring/Evaluasi kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
10	Tingkat Kemiskinan	Perlindungan dan jaminan sosial	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan pelatihan, Optimalisasi tata Kelola pemerintahan, serta Peningkatan Infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Kerjasama lintas sektor dengan lembaga non pemerintahan dan swasta (CSR) dalam pengentasan kemiskinan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
11	Tingkat Partisipasi	1. Penempatan Tenaga Kerja 2. Pengarusutamaan Gender dan	1. Peningkatan akses lowongan pekerjaan 2. Pelatihan Tenaga Kerja siap Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	Angkatan Kerja Wanita	Pemberdayaan Perempuan			
12	Persentase Pekerja Informal	1. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2. Hubungan Industrial 3. Penempatan Tenaga Kerja 4. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Perencanaan Tenaga Kerja	1. Peningkatan akses lowongan pekerjaan 2. Pelatihan Tenaga Kerja siap Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal		1. Pendataan Penyandang Disabilitas usia Produktif (th .2025 dan 2026) 2. Pelatihan Penyandang Disabilitas (2 paket) (th.2025 dan 2026) 3. Job Fair bagi Penyandang Disabilitas (2026)	<i>Dinas Tenaga Kerja</i>	<i>Dinas Tenaga Kerja</i>
14	Gini Ratio	Pemberdayaan Masyarakat	1. Hibah Bansos 2. Pemberdayaan UMKM 3. Pemberdayaan Pelaku Wisata atau pokdarwis	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
15	PDRB Perkapita	Peningkatan Pendapatan	1. Peningkatan Pendapatan 2. Pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal 3. Peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan digitalisasi UMKM 4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal melalui pelatihan insentif fiskal	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2. Hubungan Industrial 3. Penempatan Tenaga Kerja 4. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Perencanaan Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Perluasan Kesempatan Kerja 4. Mengembangkan pendidikan dan Latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja 5. Peningkatan kualitas layanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia 6. Pengembangan sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
17	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi)		1. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan melalui visit 2. Pemanfaatan data ILAP dari Kabupaten Kulon Progo, ditelusuri apakah sudah ber-NPWP atau belum 3. Pemanfaatan data AJB dari PPAT	<i>Bukan Kewenangan Kabupaten</i>	<i>KPP Pratama</i>

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
SASARAN 3 : PEMBANGUNAN KELUARGA					
No.	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Pengendalian Penduduk	1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 5. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 6. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB
19	Indeks Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Penyediaan/Pembangunan tangki septik skala individual 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan IPLT	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
22	Indeks Lansia Berdaya	Bina Keluarga Lansia	1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 3. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 5. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 6. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Optimalisasi Program Bina Keluarga Remaja, Genre dan PIK R 2. Kelas pengasuhan remaja untuk orang tua 3. Kolaborasi sekolah, orang tua dan Masyarakat dalam membina keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan	(Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	1. Melakukan sosialisasi yang masif dan jelas kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang UHC Universal Health Coverage	Dinas Kesehatan	

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
	Kesehatan Nasional (%)	Masyarakat) Pengelolaan pelayanan jaminan kesehatan Masyarakat	2. Membangun komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk mendukung UHC, seperti yang ditunjukkan oleh program UHC Prioritas		
SASARAN 4 : PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK					
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 2. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 4. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB
26	Rate Nett Recent Migrasi (Proxy : Kepadatan Penduduk (%))	Pengendalian Penduduk	1. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengurangi dorongan migrasi keluar misalnya dengan pengembangan UMKM dan ekonomi desa 2. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyediaan lapangan kerja dan pelatihan kewirausahaan di daerah asal migran 3. Sosialisasi peluang kerja lokal dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di wilayah sekitar	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
			4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 5. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 6. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana		
SASARAN 5 : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
No.	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 2. Inovasi Dukcapil Kulon Progo Kacar Kucur : Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur 3. Inovasi Dukcapil Kulon Progo Kado Nikah : Kolaborasi Dokumen Pasca Nikah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV PENUTUP

A. Monitoring

Pemantauan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap indikator-indikator dan rencana aksi PJPK. Pemantauan dilakukan secara berkala (triwulan/semester) melalui sistem pengawasan terintegrasi yang mencakup pemantauan kemajuan terhadap pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan pemantauan bertujuan mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang muncul, sekaligus merumuskan rekomendasi bersifat korektif dan adaptif.

B. Evaluasi

Evaluasi elemen penting dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja implementasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator serta mengukur dampak kebijakan dan program serta mengungkap hambatan dalam pelaksanaan. Evaluasi dilakukan oleh TIM Koordinasi Pelaksanaan GDPK/PJPK minimal 1 kali dalam setahun dengan menjelaskan capaian dari suatu program. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat efektif dan efisien.

C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelaporan menjadi dasar pemangku kebijakan dalam menyusun strategi Pembangunan kependudukan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pelaporan dilakukan untuk menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi yang telah disusun. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala daerah selaku pimpinan tertinggi eksekutif dalam Pemerintah daerah.

Wates, 6 April 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN